

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pelaporan keuangan daerah merupakan kegiatan yang menghasilkan *output* laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dengan membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur oleh peraturan Kepala Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah maka, pemerintah daerah wajib menerapkan pencatatan dan pelaporan berbasis akruaL. Konseptual dari Sistem Akuntansi Pemerintah ialah pelaporan keuangan yaitu Laporan Operasional hingga Neraca, dan kebijakan terkait akun-akun yang perlu penatausahaan dan pencatatan. Pemerintah daerah wajib menatausahakan dan membuat laporan keuangan semua kekayaan yang menjadi bagian dari APBD.

Persediaan merupakan bagian dari APBD. Persediaan merupakan aktiva lancar penunjang penting dari kegiatan operasional setiap satuan kerja. Persediaan sangat berisiko akan adanya kerusakan dan kehilangan. Kendala ini tentunya akan mengganggu kegiatan operasional pemerintah daerah. Kegiatan operasional dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga perlu adanya tinjauan atas pelaksanaan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan dari persediaan demi terciptanya *good governance*.

Persediaan memiliki nilai ekonomi dan dikuasai oleh pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu, dalam hal ini adalah pembelian maupun hibah, dan manfaat ekonomi tersebut dapat digunakan untuk masa depan oleh pemerintah maupun masyarakat. Persediaan memiliki bentuk berupa barang atau perlengkapan yang dapat berguna untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah maupun barang-barang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan satuan kerja perangkat daerah atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang pendidikan, olahraga, dan seni pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah luar biasa di Kabupaten Sragen. Persediaan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memiliki jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan SKPD lainnya. Persediaan ATK merupakan persediaan dengan jumlah terbanyak dikutip dari Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada tahun 2019 sebesar Rp 80.287.370 dan tahun

2020 sebesar 47.539.396. Jumlah ini lebih dari 40% dari jumlah keseluruhan persediaan ATK yang ada pada CaLK Kabupaten Sragen tahun 2020.

Kondisi ini tentunya menjadi sangat krusial dalam hal penatausahaan dan pencatatan persediaan ATK pada satuan kerja tersebut. Jumlahnya yang lebih dari 80 juta rupiah dan keberadaannya yang tersebar pada beberapa lokasi memungkinkan terjadi kendala atau ketidaksesuaian pencatatan yang dilakukan dengan peraturan yang ada.

Selain itu, ATK yang ada pada Dinas Pendidikan diketahui, menurut wawancara dengan narasumber, merupakan persediaan dengan saldo terbanyak dan hasil rekonsiliasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Sehingga persediaan ATK setiap triwulan perlu dilakukan rekonsiliasi dan penatausahaannya. Penatausahaan ini diketahui dilakukan menggunakan aplikasi SIMBAPER dan secara manual. Yang kemudian, saldonya diakhir tahun akan direkonsiliasi dan secara manual dilaporkan untuk masuk ke dalam saldo laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlakuan akuntansi persediaan ATK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2018-2020?
2. Apakah perlakuan pencatatan akuntansi persediaan ATK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permendagri N0. 64 Tahun 2013, PSAP No. 5 dan Peraturan Bupati Sragen No. 39 Tahun 2018?

3. Bagaimana kualitas informasi akuntansi informasi persediaan ATK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen?
4. Apakah terdapat kendala dan permasalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan persediaan ATK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisannya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi persediaan ATK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tahun 2018-2020;
2. Untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan persediaan ATK Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi persediaan ATK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
4. Untuk mengetahui apa kendala dan permasalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan persediaan ATK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah seputar bagaimana pencatatan persediaan ATK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada Tahun Anggaran 2018 – 2020. Mulai dari barang diterima, register barang, penggunaan, hibah masuk dan keluar, penghapusan, cek fisik, pelaporan hingga penyajian dalam laporan keuangan.

Karya Tulis Tugas Akhir ini juga membahas apakah proses pencatatan dan pelaporan persediaan ATK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu

Permendagri No. 64 Tahun 2013, PSAP Nomor 5 dan Peraturan Bupati Sragen No. 39 Tahun 2018. Apakah selama proses pencatatan dan pelaporan terdapat kendala dan permasalahan, mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki banyak persediaan ATK yang mencapai lebih dari 40% dari keseluruhan angka persediaan ATK dalam LPKD 2020. Jika terdapat kendala dan masalah, apa bentuk upaya kebijakan maupun antisipasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini ada manfaat yang harus didapatkan dari beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis sendiri akan menambah wawasan dan pengalaman mengenai bagaimana pencatatan dan pelaporan persediaan ATK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen diharapkan bahwa karya tulis ini dapat menjadi sarana dalam hal evaluasi dan alternatif solusi untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat atau pembaca diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sebuah gambaran dan menambah wawasan sebagai sarana *check and balance* antara pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana pencatatan dan pelaporan persediaan ATK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri dari sub bab-sub bab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis memberikan gambaran umum tentang Karya Tulis Tugas Akhir tentang implementasi akuntansi persediaan ATK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020 meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini, penulis menjelaskan teori dan ketentuan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan atau kriteria untuk melakukan tinjauan terhadap akuntansi persediaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2020. Bagian ini juga menjelaskan tentang teori sistem informasi akuntansi pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III, penulis menyajikan landasan mengenai penerapan akuntansi persediaan ATK seperti definisi dan kriteria persediaan ATK. Kemudian bagaimana prinsip pengakuan, pengukuran, beban, pengecekan fisik, penyajian dan pengungkapan persediaan ATK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pernyataan nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 39 Tahun 2018.

Penulis juga akan membahas bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah persediaan ATK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Apa dan bagaimana sistem informasi akuntansi yang telah digunakan. Selain itu penulis juga akan membahas kendala dalam menjalankan akuntansi

berbasis akrual pada persediaan ATK dan bagaimana kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh penulis.